

**STUDI DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN
STRUKTURAL PADA RUMAH TANGGA NELAYAN DI
NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh

ROBI EKA PUTRA
BP. 2005 / 67883

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

STUDI DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN STRUKTURAL PADA
RUMAH TANGGA NELAYAN DI NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN
SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama : Robi Eka Putra
BP/NIM : 2005/67883
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2011

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP. 19610502 198601 2 001

Drs. Akhirmen, M.Si
NIP. 19621105 198703 1 002

Diketahui Oleh :

Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan

Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP. 19610502 198601 2 001

PENGESAHAN

***Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Program
Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang***

Judul : Studi Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan Struktural Pada
Rumah Tangga Nelayan Di Nagari Amping Parak Kecamatan
Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Robi Eka Putra

BP/NIM : 2005/67883

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Keahlian : Perencanaan Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2011

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S

1. _____

2. Sekretaris : Drs. Akhirmen, M.Si

2. _____

3. Anggota : Drs. Zul Azhar, M.Si

3. _____

4. Anggota : Dra. Armida,S, M.Si

4. _____

ABSTRAK

Robi Eka Putra (2005/67883): Studi Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan Struktural Pada Rumah Tangga Nelayan di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Ibu Dr Sri Ulfa Sentosa,MS dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Distribusi pendapatan perorangan nelayan di nagari Amping Parak kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan (2) Kemiskinan struktural pada rumah tangga nelayan di nagari Amping Parak kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dari 88 sampel rumah tangga nelayan dengan teknik pengumpulan data angket menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data adalah deskriptif dan Gini Rasio. Gini Rasio untuk melihat tinggi rendahnya disrtibusi pendapatan nelayan di nagari amping parak kecamatan sutera kabuparen pesisir selatan.

Hasil penelitian ini (1) Kondisi ketimpangan distribusi pendapatan perorangan nelayan di nagari Amping Parak kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil gini rasio sebesar 0,4841 yang berarti distribusi pendapatan perorangan nelayan berada pada kategori ketimpangan sedang dapat dilihat dari tidak meratanya pendapatan nelayan karena banyaknya nelayan belum memiliki alat tangkap dan masih tergantung kepada nelayan pemilik alat tangkap dengan rata-rata pendapatan perorangan nelayan sebesar Rp 45.585.447 per tahun. (2) Kemiskinan struktural yang terjadi di nagari Amping Parak kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan paling banyak disebabkan oleh indikator kebijakan ekonomi yang tidak adil yang menyebabkan seringnya nelayan menerima kebijakan ekonomi yang tidak adil dari pemerintah sehingga terjadilah kemiskinan struktural pada rumah tangga nelayan

Penulis menyarankan kepada nelayan yang memiliki pendapatan di bawah Rp 4.800.000 per tahun diharapkan mempunyai mata pencaharian lain diluar sektor perikanan sehingga distribusi pendapatan perorangan nelayan lebih merata. Dan pemerintah daerah maupun pusat mengorganisir dengan baik dalam memberikan bantuan berupa alat tangkap agar bantuan tersebut tepat sasaran dan sampai pada orang yang benar-benar membutuhkan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “ Studi Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan Struktural Pada Rumah Tangga Nelayan di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr Sri Ulfa Sentosa, MS selaku pembimbing I dan Bapak Drs.Akhirmen, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Amar B, M.S selaku dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberi izin pada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S, sebagai Ketua dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si, sebagai Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Ibu Dra. Armida,S,M.Si sebagai dosen penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar pada Fakultas Ekonomi yang telah memberikan sumbangan pikirannya selama perkuliahan demi terwujudnya skripsi ini.
5. Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Selatan dan bapak Wali Nagari Amping parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan yang telah membantu memberikan izin dan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data penelitian ini.
6. Teristimewa kepada ayah dan ibu tercinta serta adik-adikku yang tersayang, yang telah tulus dan ikhlas memberikan dorongan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. “*Amourientine-ku*” yang selalu memberi semangat dan ketenangan hati dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya kepada Allah penulis memohon semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang setimpal, Amin....

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori	
1. Pengertian Distribusi Pendapatan	9
2. Jenis-Jenis Distribusi Pendapatan	17
3. Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	18

4. Penghitungan Pendapatan	25
5. Kemiskinan Struktural	28
6. Temuan Penelitian Sejenis	32
B. Kerangka Konseptual	33
C. Hipotesis	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	36
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Defenisi Operasional	38
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	47
2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	49
3. Karakteristik Responden	49
4. Analisis Gini Rasio	60
5. Kemiskinan Struktural	62
B. Pembahasan	68

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA..... 74

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Jumlah Nelayan Berdasarkan Kepala Keluarga (KK) di Nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan Tahun, 2008	2
2. Pendapatan Nelayan di Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan	3
3. Jumlah Alat Tangkap Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap Ikan di Nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan	4
4. Kriteria Kemiskinan.....	31
5. Jumlah Nelayan Berdasarkan Kepala Keluarga (KK) di Nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan.....	39
6. Jumlah Penduduk di Nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan	48
7. Distribusi Frekuensi Umur Responden.....	49
8. Distribusi Frekuensi Status Perkawinan.....	50
9. Distribusi Frekuensi Jumlah Anak.....	51
10. Distribusi Frekuensi Lama jadi Nelayan	53
11. Distribusi Frekuensi Pendidikan Nelayan.....	55
12. Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Sampingan	56
13. Distribusi Frekuensi Penyuluhan dari Pemerintah.....	56
14. Distribusi Frekuensi Pendapatan Perorangan Nelayan.....	58
15. Distribusi Indek Gini Rasio.....	61
16. Distribusi Frekuensi Kemiskinan Struktural.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kurva Lorenz	21
2. Koefisien Gini.....	22
3. Kerangka Konseptual.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Angket Penelitian	77
2. Tabulasi Data Responden	83
3. Tabulasi Data Kemiskinan Struktural.....	85
4. Hasil Analisis Indeks Gini Rasio	87
5. Hasil Distribusi Frekuensi Kemiskinan Struktural	88
6. Hasil Analisis Deskriptif	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Sutera adalah sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Pesisir Selatan dan memiliki 3 kenagarian yaitu kenagarian Surantih, Teratak dan Amping Parak. Wilayahnya berbatasan langsung dengan laut sebelah barat. Daerah ini juga menghubungkan antar kecamatan dan kecamatan dengan ibu kota kabupaten. Karena daerahnya berbatasan langsung dengan laut, sehingga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan.

Nelayan di kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 2.214 orang yang terdiri dari nelayan penuh sebanyak 1.743 orang dan nelayan sambilan sebanyak 471 orang. Walaupun kontribusinya relatif cukup besar terhadap perekonomian daerah dan didukung dengan jumlah tenaga kerja yang terserap cukup tinggi pada sub sektor perikanan, tetapi jika dilihat kehidupan para nelayan pada umumnya tingkat kesejahteraannya masih rendah.

Kenagarian Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan yang penduduknya berjumlah 8.298 jiwa. Dari jumlah penduduknya yang cukup tinggi hanya sekitar 10 % yang bermata pencaharian sebagai petani, atau sebesar 830 jiwa. Dengan daerah yang berdekatan dengan pantai sehingga mempengaruhi mata pencaharian penduduknya yang sebagai nelayan, baik nelayan tidak memiliki modal maupun nelayan pemilik modal.

Kenagarian Amping Parak kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini tentang jumlah nelayan di kenagarian Amping Parak kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2008.

Tabel 1 : Jumlah Nelayan Berdasarkan Kepala Keluarga (KK) di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun, 2008

No	Jenis Nelayan	Jumlah	%
1	Nelayan Penuh	741	84,78
2	Nelayan Sambilan	133	15,21
	Total	874	100

Sumber : *Penyuluh Kelautan dan Perikanan Kecamatan Sutura, 2008*

Berdasarkan Tabel 1, di peroleh data bahwa jumlah nelayan di nagari Amping Parak kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 874 orang yang terdiri dari 741 nelayan penuh dan 133 nelayan sambilan.

Nagari Amping Parak kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki potensi perikanan cukup tinggi dan memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah. Mata pencarian utama penduduk di daerah tersebut adalah sebagai nelayan, baik nelayan penuh maupun nelayan sambilan.

Selain itu nagari tersebut dicirikan oleh kemiskinan dan keterbelakangan yang terlihat jelas dari rendahnya tingkat pendapatan dan tidak meratanya distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan adalah masalah pokok dalam pembangunan, karena ketimpangan pendapatan mencerminkan ketimpangan pembanguan yang diikuti oleh ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Berdasarkan observasi awal, fenomena distribusi pendapatan nelayan yang terjadi di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat gambarannya pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 : Pendapatan Nelayan di Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Pendapatan per minggu (Rp)
1	Jang kobok	500.000,-
2	Veri	700.000,-
3	Anto	230.000,-
4	Solok	200.000,-
5	Eri	200.000,-
6	Sadar	150.000,-
7	Tae	125.000,-
8	Pak Robos	145.000,-
9	Jamuir	110.000,-
10	Doral	170.000,-
Jumlah (Σ)		2.530.000,-
Rata-rata		$2.530.000 : 10 = 253.000,-$

Sumber : Wawancara di Lapangan, 2009

Berdasarkan Tabel 2, pendapatan nelayan di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan beragam, rata-rata pendapatan nelayan tersebut berkisar dari Rp. 110.000,- sampai Rp. 700.000,-. Pendapatan tertinggi dari wawancara dengan nelayan adalah Rp. 700.000,- dan pendapatan terendah Rp. 110.000,-. Rata-rata pendapatan nelayan nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar Rp. 253.000,- per minggu. Beragamnya pendapatan nelayan tersebut diduga disebabkan oleh masing-masing nelayan bekerja sebagai nelayan tradisional dan sebagai nelayan pemilik modal. Pada umumnya nelayan tradisional memperoleh pendapatan di bawah pendapatan pemilik modal.

Perbedaan pendapatan diantara nelayan di kenagarian Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan kemungkinan disebabkan oleh perbedaan alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan antara lain berupa Payang, Pukat Pantai, Tonda Rawai Dasar, Sampan Jaring, Sampan Pancing, Penangkap Kepiting. Penggunaan jumlah alat penangkapan ikan menurut jenis alat pengangkap ikan dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3 : Jumlah Alat Tangkap Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap Ikan di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah	%
1	Payang	38	26,76
2	Pukat Pantai	24	16,90
3	Tonda	23	16,19
4	Rawai Dasar	11	7,74
5	Sampan Jaring	8	5,63
6	Sampan Pancing	33	23,23
7	Penangkap Kepiting	5	3,52
	Total	142	100

Sumber : *Penyuluh Kelautan dan Perikanan Kecamatan Sutera, 2008*

Dari data Tabel 3, dapat dilihat bahwa alat tangkap yang banyak di gunakan di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan adalah Payang sebanyak 38 unit. Alat tangkap yang paling sedikit digunakan di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan adalah Penangkap Kepiting sebanyak 5 unit.

Dari banyaknya alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar dimiliki oleh nelayan pemilik modal. Payang, pukat pantai dan tonda yang merupakan alat tangkap yang paling banyak dimiliki nelayan pemilik modal karena harga belinya cukup mahal sehingga nelayan yang tidak memiliki

modal hanya bisa bekerja pada nelayan pemilik modal. Hanya sebagian kecil saja nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri seperti sampan jaring dan penangkap kepiting yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, sehingga menimbulkan kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi pada nelayan di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan diduga merupakan kemiskinan struktural karena berdasarkan pengamatan nelayan pemilik modal melakukan kebijakan kepada nelayan yang tidak memiliki modal dengan cara memberikan pinjaman uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan syarat hasil tangkapan ikannya dijual kepada nelayan pemilik modal, sehingga nelayan yang tidak memiliki modal selalu dibawah tekanan nelayan pemilik modal, hubungan demikianlah yang menyebabkan nelayan tidak memiliki modal selalu miskin.

Nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi perikanan laut yang tinggi dan jumlah nelayan yang cukup banyak, seharusnya kehidupan dan pendapatan nelayan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup karena telah bekerja setiap hari. Tetapi pada kenyataannya pendapatan masyarakat di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan tidak sesuai dengan dengan potensi laut yang dimiliki dan perbedaan pendapatan perorangan serta pendistribusian antara pendapatan perorangan dengan pendapatan pemilik modal atau pendapatan pemilik faktor-faktor lainnya.

Dari masalah di atas ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh banyaknya nelayan yang belum memiliki alat tangkap dan hanya bekerja pada nelayan pemilik alat tangkap ikan dan kemiskinan struktural yang terjadi di nagari Aming Parak diduga kemiskinan disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh nelayan pemilik modal atau pemilik alat tangkap.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai kehidupan nelayan di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul Studi Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan Struktural Pada Rumah Tangga Nelayan Di Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Distribusi pendapatan perorangan nelayan nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan adalah timpang.
2. Terdapat kemiskinan struktural pada nelayan nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan.
3. Terdapat kemiskinan kultural pada nelayan nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang sedang diteliti dan juga keterbatasan waktu, biaya dan juga tenaga, maka penulis membatasi penelitian ini yaitu : pendapatan perorangan nelayan dan kemiskinan struktural yang terdapat pada nelayan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana distribusi pendapatan perorangan nelayan nagari Amping Parak kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apakah terdapat kemiskinan struktural pada nelayan nagari Amping Parak kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Distribusi pendapatan perorangan nelayan nagari Amping Parak kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kemiskinan struktural nelayan nagari Amping Parak kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan yaitu Ekonomi Pembangunan, terutama teori distribusi pendapatan dan kemiskinan.
2. Pemerintah terutama dinas perikanan dalam penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan masalah pendistribusian pendapatan nelayan di kabupaten Pesisir Selatan.
3. Penelitian lebih lanjut tentang distribusi pendapatan nelayan dan kemiskinan struktural.
4. Dapat dijadikan sebagai salah satu peryaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Srata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Distribusi Pendapatan

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta pada akhir periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode bukan hanya yang dikonsumsi.

Adapun menurut David Ricardo dalam Jhingan (1999:88) teori distribusi pendapatan adalah didasarkan pada asumsi bahwa :

- a. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu distribusi industri
- b. “*Law of diminishing return*” berlaku bagi tanah
- c. Persediaan tanah adalah tetap
- d. Permintaan akan gandum benar-benar inelastis
- e. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel
- f. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu (*given*)
- g. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
- h. Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap
- i. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal, baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja
- j. Terdapat persaingan yang sempurna
- k. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan.

Berdasarkan teori tersebut yang saling berhubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yakni tuan tanah, kapitalis dan buruh atau pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengelola tanah, dan para buruh yang mengerjakannya. Seluruh pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok masyarakat yang masing-masingnya sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah.

Sewa per unit buruh adalah perbedaan antara produk rata-rata dan marginal. Keseluruhan sewa sama dengan perbedaan antara produk rata-rata dengan produk marginal dikalikan dengan banyaknya tenaga kerja dan modal yang digunakan dalam pengelolaan tanah. Tingkat upah ditentukan oleh cadangan upah dibagi dengan jumlah buruh (David Ricardo dalam Jhingan, 1999:89).

Jadi dari keseluruhan gandum yang dihasilkan dan dijual, sewa mempunyai prioritas utama dan sisanya (hasil dikurangi sewa) dibagi-bagikan sebagai upah dan keuntungan, sementara bunga termasuk dalam keuntungan.

Menurut Sukirno (1998:64) distribusi pendapatan di beberapa negara terdapat dua analisis diantaranya distribusi pendapatan relatif yang merupakan perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan, dan distribusi pendapatan mutlak yaitu persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu. Salah satu indikator utama untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Indikator yang dimaksud bersangkutan dengan pendapatan dan pengeluaran, dan yang lebih penting adalah mengetahui besarnya perbandingan dan pengeluaran.

Jhingan (2003:31), menyatakan bahwa pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu, oleh karena itu pendapatan dapat diartikan sebagai suatu penghasilan atau menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang baik yang digunakan sebagai konsumsi maupun digunakan untuk tabungan. Dengan pendapatan yang diperoleh tersebut digunakan untuk keperluan hidup untuk mencapai kepuasan.

Pendapatan (*income*) dari seseorang (rumah tangga) adalah hasil penjualan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki kepada sektor produksi. (Boediono; 1982;140) ini menegaskan bahwa sektor produksi tersebut juga membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input dalam rangka produksi dengan harga yang berlaku dipasar.

Secara singkat faktor pendapatan seseorang ditentukan oleh jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki dan harga masing-masing faktor produksi tersebut. Sumber pendapatan masyarakat pedesaan umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Pendapatan tersebut adalah pendapatan yang berasal dari dalam usaha tani melalui kegiatan usaha tani (*farm activities*) dan berasal dari luar usaha tani melalui kegiatan non usaha tani(*non farm activities*). Pendapatan usaha tani merupakan suatu bentuk imbalan dari jasa pengelolaan (petani), tenaga kerja dan modal yang dimiliki (termasuk didalamnya lahan) yang diperoleh dari kegiatan berproduksi dalam usaha tani Soekartawi; 1989;116).

Selanjutnya, pendapatan diluar usaha tani adalah imbalan yang diperoleh akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan diluar usaha tani, pendapatan di dalam usaha tani merupakan balas jasa faktor-faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, modal dan jasa pengolahan. Pendapatan (Y) diperoleh dari selisih penerimaan ($TR=Total\ Revenue$) dari penjualan komoditas (Q) yang dihasilkan dengan jumlah biaya ($TC=Total\ Cost$) yang dikeluarkan untuk menghasilkan

komoditas tersebut (Boediono; 1982:89), maka secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = TR - TC \dots\dots\dots(1)$$

$$= P_oQ - P_nN \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

Y = Pendapatan usaha tani

P_o = Harga output

Q = Output

P_n = Input

Pendapatan petani menurut Adiwilaga (1980:115), merupakan pendapatan yang bisa berupa padi, uang dan juga bisa berupa barang lain yang bukan padi. Karena keterbatasan petani dalam menggarap lahan pertanian menyebabkan sumber pendapatan mereka pada umumnya tidak berasal dari sektor pertanian saja, tetapi mereka juga berusaha memperoleh pendapatan dari sumber lain diluar usaha tani.

Soekartawi (1986:78), menyatakan bahwa jika sumber pendapatan keluarga petani berasal dari dua sumber yaitu dari usaha tani dan non usaha tani, maka total pendapatan keluarga tani tersebut adalah :

$$Y_{tot} = Y_1 + Y_2 \dots\dots\dots(3)$$

$$= (TR_1 - TC_1) + (TR_2 - TC_2) \dots\dots\dots(4)$$

Dimana :

Y_1 = Pendapatan usaha tani

Y_2 = Pendapatan non usaha tani

Dikutip dalam Asmadia (2004:11) ada beberapa konsep untuk menentukan perhitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan bersih adalah pendapatan kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dengan rumus sebagai berikut :

$$Y_B = PQ - \sum r_i x_i \dots\dots\dots(5)$$

Y_B = Pendapatan bersih

P = Harga output

Q = Total harga

r_i = Harga input ke (i)

x_i = Jumlah input ke (i)

I = 1,2,3.....n

- b. Pendapatan kotor adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari semua cabang dan sumber di dalam usaha tani maupun di luar usaha tani maupun diluar usaha tani selama satu tahun. Untuk menghitung pendapatan kotor digunakan rumus sebagai berikut :

$$YK = P.Q \dots\dots\dots(6)$$

Dimana

YK = Pendapatan kotor

P = Harga output

Q = Total output

Selanjutnya, untuk menetapkan pendapatan kotor dari tiap-tiap cabang usaha tani maupun di luar usaha tani (Soekartawi;1986:80)

- a. Jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan dengan mengingat akan adanya penerimaan pada permulaan dan akhir tahun.
- b. Nilai dari pengeluaran-pengeluaran berupa bahan-bahan dari usaha tani, keperluan rumah tangga dan keperluan pribadi dan lain-lain.
- c. Nilai dan bahan-bahan yang dihasilkan dari usaha tani sendiri sebagai bangunan tetap misalnya kayu dan perumahan dan alat-alat lainnya.
- d. Hasil sewa alat-alat dan upah tenaga kerja keluarga dan pihak lain.

Biaya usaha tani adalah biaya yang betul-betul dikeluarkan selama membiayai usaha taninya yaitu dalam jangka waktu satu tahun. Dikutip dalam Asmadia (2004:12) biaya-biaya tersebut adalah:

- a. Biaya sarana produksi antara lain: bibit, pupuk, obat-obatan (pestisida) dan pengeluaran lainnya.
- b. Upah tenaga kerja, baik tenaga kerja di luar keluarga maupun tenaga kerja dalam keluarga yang diperhitungkan berdasarkan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja diluar keluarga.
- c. pengeluaran-pengeluaran tertentu berupa bahan untuk kepentingan usaha tani, misalnya upacara selamatan menjelang musim tanam dan lain-lain.
- d. Penyusutan, yang merupakan pengganti kerugian atau pengurangan nilai yang disebabkan karena waktu dan cara penggunaan dari semua modal tetap seperti bangunan, alat-alat, mesin-mesin, dan sebagainya. Modal tanah biasanya tidak dikenakan biaya penyusutan karena dengan pemeliharaan dan cara penggunaan yang baik maka nilai tanah tidak akan berkurang, mungkin akan terus bertambah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya yang betul-betul dikeluarkan selama membiayai usaha tani dalam jangka waktu satu tahun adalah Biaya sarana produksi, Upah tenaga kerja, pengeluaran-pengeluaran tertentu, Penyusutan, yang merupakan pengganti kerugian atau pengurangan nilai yang disebabkan karena waktu dan cara penggunaan dari semua modal tetap seperti bangunan, alat-alat, mesin-mesin, dan sebagainya.

Mosher (dalam Asmadia 2004:13) menyatakan bahwa pendapatan usaha tani sangat tergantung kepada salah satu yang diikutsertakan dalam proses produksi seperti tenaga kerja, produktivitas lahan garapan, kemampuan pengarahan usaha (manajemen), ukuran keluarga, kegiatan petani didalam penggunaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, benih dan sarana produksi lainnya. Kegiatan usaha tani bertujuan untuk mencapai produksi yang lebih tinggi di bidang pertanian.

2. Jenis - Jenis Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan seseorang atau distribusi ukuran pendapatan merupakan indikator yang sering digunakan oleh para ekonom Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh individu atau rumah tangga, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, apakah bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan.

Menurut Todaro (2003:222) distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Cara mendapatkan penghasilan tersebut tidak

dipermasalahan dan dalam hal ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, apakah itu hanya berasal dari gajinya karena bekerja atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah atau warisan.

Sedangkan distribusi pendapatan fungsional menurut Todaro (2003:222) merupakan ukuran distribusi pendapatan fungsional ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal). Teori distribusi pendapatan merupakan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal fisik).

3. Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai tolak ukur untuk menilai ketidakmerataan (parah atau tidaknya ketimpangan) distribusi pendapatan yang dimaksud.

Masalah distribusi pendapatan sering diikuti oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:194) ketimpangan adalah kepincangan, hal yang tidak sebagaimana mestinya (seperti tidak adil, tidak beres), tidak merata. Jadi distribusi pendapatan adalah pendapatan yang tidak terdistribusi secara merata pada sekelompok masyarakat.

Masalah ketimpangan pembagian pendapatan sebenarnya berkaitan erat dengan perbedaan tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat melalui balas jasa faktor produksinya. Pemanfaatan faktor faktor produksi tersebut akan mencerminkan besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya menimbulkan perbedaan yang mencolok antar golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Golongan berpendapatan tinggi mengurai hampir seluruh faktor produksi dan tenaga kerja yang merupakan faktor penentu pembagian pendapatan.

Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang Adelman & Morris (1973) dalam Arsyad (1999:226-227) sebagai berikut :

- a. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan penurunan pendapatan perkapita;
- b. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang;
- c. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
- d. Inflasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah;
- e. Rendahnya mobilitas sosial;
- f. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis;
- g. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang;
- h. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Selain faktor di atas, Adelman dan Morris (dalam Melani, 2008:31), ketimpangan juga disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Sistem perekonomian, semakin besar peran sektor swasta dalam perekonomian maka semakin timpang distribusi pendapatan.
- b. Proporsi faktor produksi, sangat mempengaruhi distribusi pendapatan, salah satu faktor produksi yang penting adalah tenaga kerja, laju pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi akan menurunkan tingkat upah, pada giliran berikutnya hal ini akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.
- c. Teknologi, dewasa ini teknologi yang ditransfer ke negara-negara berkembang kebanyakan bersifat kapital intensif, sehingga akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan akan menyebabkan pengangguran. Dengan demikian penggunaan teknologi yang padat modal akan memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan.
- d. Kebijakan fiskal, salah satu aspek kebijakan fiskal adalah penerimaan negara dari sisi pajak. Penggunaan pajak ini dapat digunakan untuk memberikan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pembebasan biaya sekolah, pembebasan biaya listrik dan air bersih. Hal ini biasanya membantu masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga mengurangi dampak ketimpangan.
- e. Strategi pembangunan, strategi substitusi impor akan cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan dibandingkan dengan distribusi orientasi ekspor. Karena dalam strategi substitusi impor harga barang-barang dalam negeri tinggi yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Akibatnya dampak ketimpangan distribusi pendapatan akan bertambah parah.

Jadi ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu: pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, inflasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang padat modal, rendahnya mobilitas sosial, kebijakan industri substitusi impor, buruknya nilai tukar, hancurnya industri kerajinan rakyat, sistem perekonomian, proporsi faktor produksi, teknologi, kebijakan fiskal dan strategi pembangunan.

Hasil penelitian Kuznet dalam Riza (2003:22) menemukan bahwa faktor utama yang menentukan ketidakmerataan pendapatan masyarakat adalah faktor pendapatan. Dengan menggunakan data lintas negara ditemukan bahwa adanya hubungan yang positif antara keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dan diukur dari tingkat pendapatan perkapita dengan tingkat ketidakmerataan pendapatan pada tahap awal pembangunan. Namun jika pertumbuhan ekonomi sudah mantap maka terdapat kecenderungan peningkatan pendapatan yang diikuti dengan penurunan ketidakmerataan pendapatan dalam distribusi pendapatan.

Ketidakmerataan distribusi pendapatan juga ditentukan oleh pendidikan dan pertumbuhan penduduk. Dimana pada daerah yang tidak merata distribusi pendapatannya tidak merata kesempatan dari memperoleh pendidikan tidak sangat seimbang dan juga tingkat pertumbuhan penduduk akan tinggi karena tingkat pendidikan yang rendah akan cenderung memiliki keluarga yang besar. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini nantinya akan menurunkan pendapatan perkapita masyarakat karena tidak sebanding antara tingkat pendapatan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah faktor kelembagaan dan kebijakan pemerintah akan menarik efek distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan ini dilaksanakan pada strategi pembangunan yang akan dilaksanakan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin turun ketidakmerataan distribusi pendapatan dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan atau kualitas sumber daya manusia maka ketidakmerataan distribusi pendapatan akan semakin timpang.

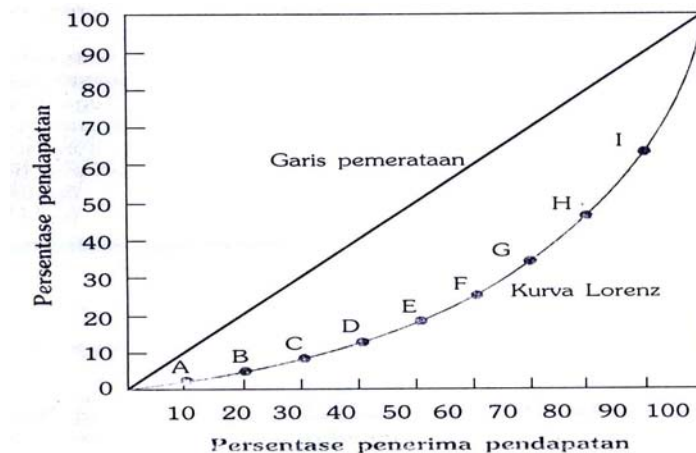
Patut ditegaskan bahwa ukuran ketimpangan distribusi pendapatan meliputi distribusi pendapatan mencerminkan pemerataan atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria dan tolak ukur untuk menilai pemerataan (parah atau tidaknya ketimpangan) distribusi pendapatan tersebut.

Tiga tolak ukur yang paling lazim untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan (Todaro; 2003:223) sebagai berikut :

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional kalangan lapisan-lapisan penduduk, kurva lorenz terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya ditempatkan pada garis diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat pada garis diagonal (semakin lurus) menyatakan distribusi pendapatan yang semakin merata. Sebaliknya, jika Kurva Lorenz akan

semakin jauh pada garis diagonal (semakin lengkung), maka mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan yang semakin timpang atau tidak merata.

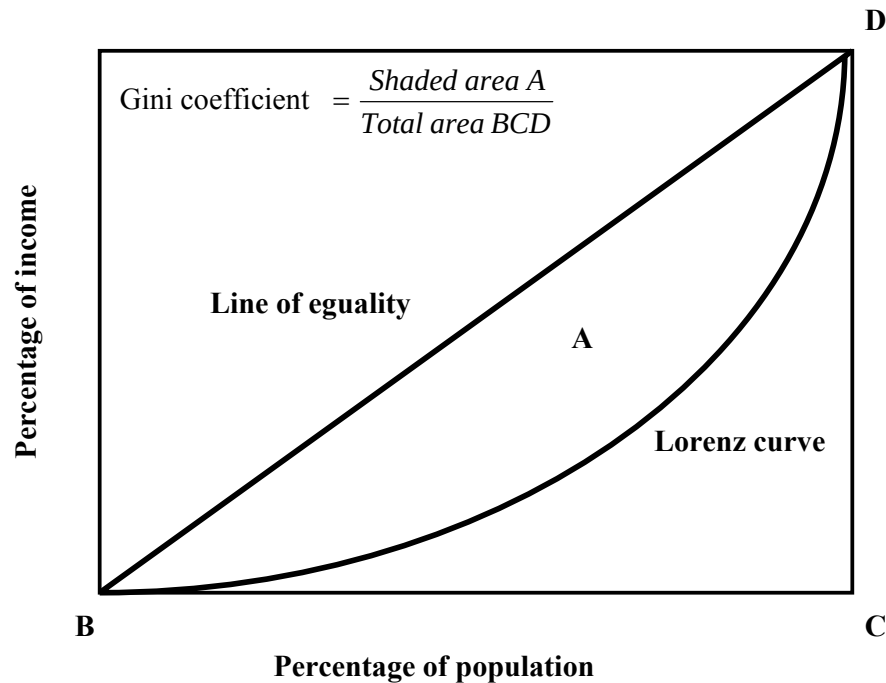


Gambar 1 Kurva Lorenz

b. Koefisien Gini (*Coefission Gini*) atau Gini Rasio

Koefisien Gini atau Gini Rasio merupakan ukuran ketimpangan pendapatan agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar dari nol (pemerataan sempurna). Koefisien gini yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 – 0,57, sedangkan untuk distribusi pendapatan yang relatif merata angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35.

Indeks atau Gini Rasio adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati 0) koefisiennya, maka semakin baik atau meratanya distribusi pendapatan. Dan sebaliknya, semakin besar (semakin mendekati 1) koefisiennya, maka distribusi pendapatan yang semakin timpang.



Gambar 2. Koefisien Gini

Angka Rasio Gini dapat ditaksir secara langsung dari Kurva Lorenz, yaitu perbandingan dari luas area yang terletak diantara Kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga DBC. (Todaro; 2003:226).

Dipilih Gini Rasio sebagai alat pengujian karena gini rasio memiliki beberapa kelebihan (Todaro; 2000:226) yang dikutip dalam Melani, 2008:32 sebagai berikut :

- 1) Merupakan indikator yang paling terkenal dan umum digunakan;
- 2) Merupakan variabel yang dinamis dalam mengukur ketidakmerataan pendapatan baik antar daerah maupun antar sektor dalam suatu negara;
- 3) Memperlihatkan kecenderungan yang sama menurut kurun waktu dan antar daerah yang dicapai dengan menggunakan ukuran yang berbeda.

Jadi Gini Rasio sebagai alat pengujian karena memiliki kelebihan diantaranya indikator yang paling terkenal dan umum variabel yang dinamis dalam mengukur ketidakmerataan pendapatan serta memperlihatkan kecenderungan yang sama dalam kurun waktu dan antar daerah yang dicapai dengan menggunakan ukuran yang berbeda.

Rumus Gini Rasio menurut BPS (2006:8) adalah sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^k f_i (y_i^* + y_{i-1}^*) \dots \dots \dots (7)$$

Keterangan :

Y_i = Proporsi secara kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga
sampai kelas ke-i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

k = Jumlah kelas interval

Beberapa kriteria yang dipenuhi oleh koefisien Gini bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (BPS;2006:8) antara lain :

- a. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*), ini berarti bahwa semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah.
- b. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*), jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*).
- c. Simetris, jika bertukarnya tempat tingkat pendapatan seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan.
- d. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat (BPS, 2006: 8) antara lain:

- a. Dapat didekomposisi, bahwa ketimpangan dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Koefisien Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai koefisien Gini dari sub kelompok masyarakat.
- b. Dapat diuji secara statistik, seseorang harus dapat menguji signifikan perubahan indeks antar waktu.

Dari ukuran ketimpangan yang dijelaskan di atas bahwa ketimpangan yang baik diharapkan mempunyai sifat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain dan juga mempunyai sifat Dapat diuji secara statistik.

Untuk melihat tinggi rendahnya distribusi pendapatan nelayan nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur dengan menggunakan Gini Rasio. Menurut Todaro (2000:88) ada spesifikasi nilai Gini Rasio yaitu:

- a. 0,20 – 0,35 yaitu ketimpangan ringan
- b. 0,36 – 0,46 yaitu ketimpangan sedang
- c. 0,50 – 0,70 yaitu ketimpangan tinggi

Atau secara matematis :

$$GR = \frac{\text{Luas Bidang } X}{\text{Segitiga } ABC} = \frac{X}{X + Y} \dots\dots\dots(8)$$

(Todaro, 2000: 12)

c. Kriteria bank Dunia (*World Bank*)

Bank menggolongkan penduduk menjadi tiga golongan, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin), 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi (penduduk terkaya)

Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan 40 persen penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dikatakan sedang apabila 40 persen penduduk termiskin menikmati 12 hingga 17 persen pendapatan nasional. Sedangkan 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional, maka ketimpangan dikatakan lunak atau distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata (Dumairi; 1996:55).

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas ada tiga kriteria yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yaitu : Kurva Lorenz, Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia (*world Bank*).

4. Perhitungan Pendapatan

Pendapatan nasional adalah nilai dari seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Ada tiga metode dalam menghitung pendapatan yaitu :

a. Metode Pengeluaran

Menurut Sukirno (2000:31) pendapatan nasional yang dihitung dengan menghitung dan menaksir aliran belanja yang dilakukan rumah tangga, penanaman modal pemerintah dan luar negeri. Aliran belanja ini merupakan nilai

pengeluaran yang dilakukan terhadap barang-barang akhir dan jasa akhir yang diproduksi oleh perusahaan.

Barang akhir dan jasa akhir yang dibeli rumah tangga meliputi barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jenis barang dan jasa yang digunakan tersebut meliputi bahan makanan dan minuman, berbagai jenis pakaian, barang kebutuhan rumah tangga, dan jasa-jasa yang dibutuhkan rumah tangga.

Deliarnov dalam Lestari (2005:24) menggolongkan pengeluaran sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran konsumsi, yaitu total semua pengeluaran rata-rata untuk membeli barang dan jasa keperluan rumah tangga;
- 2) Pengeluaran perusahaan atau investasi, yaitu pengeluaran untuk membeli barang modal atau investasi;
- 3) Pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu pengeluaran yang bersifat konsumsi yang dilakukan pemerintah atas barang dan jasa, seperti perbaikan jalan;
- 4) Ekspor bersih, yaitu selisih ekspor dan impor.

Jadi, untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, maka pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan nilai nilai pengeluaran rumah tangga, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan ditambah dengan pengeluaran atas barang-barang impor atau selisih ekspor dan impor. Sehingga uraian diatas menyatakan bahwa dalam metode pengeluaran, pengeluaran terdiri dari pengeluaran konsumsi, non konsumsi dan tabungan.

b. Metode Pendapatan

Menurut Sukirno (2000:32) dalam metode pendapatan, yang dihitung dan ditaksir adalah nilai pendapatan dari faktor-faktor produksi, yang berupa gaji dan sewa dan bunga serta keuntungan perusahaan. Pendapatan dari faktor-faktor produksi yang penting adalah upah dan gaji. Jenis pendapatan ini merupakan

imbalan kepada tenaga kerja dalam perekonomian baik itu tenaga kerja terdidik ataupun tenaga kerja terdidik. berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa komponen-komponen yang dapat dalam metode pendapatan adalah upah dan gaji, sewa, bunga dan laba.

Deliarnov dalam Lestari (2005:25) menggolongkan pendapatan atas dua yaitu: pendapat pribadi dan pendapatan disposibel. Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang diterima seluruh anggota baik dari hasil kerja, beasiswa, pembayaran pensiun, dan sebagainya. Tidak semua pendapatan pribadi dapat digunakan untuk tujuan konsumsi dan tabungan, sebab sebagian harus dikeluarkan untuk membayar pajak. Pendapatan disposibel adalah pendapatan pribadi yang siap digunakan untuk konsumsi.

c. Metode Produksi dan Nilai Tambah

Menurut Sukirno (2000:33) dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara perhitungan produksi dan nilai tambah yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Penggunaan metode ini dalam penghitungan pendapatan nasional mempunyai dua tujuan penting antara lain :

- 1) Untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor di dalam mewujudkan pendapatan nasional;
- 2) Sebagai salah satu cara untuk menghindari perhitungan dua kali yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi.

Uraian di atas menjelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dengan nilai

tamabah yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah dari berbagai sektor dalam perekonomian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengeluaran dimana penghitungannya dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi di nagari Amping Parak kecamatan Sutura kabupaten Pesisir Selatan.

5. Kemiskinan Struktural

a. Pengertian Kemiskinan

Menurut Todaro (2000:32) indikator kemiskinan yaitu : seseorang dikatakan miskin secara absolute apabila tingkat pendapatanya berada dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain pangan, sandang, kesehatan perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja.

Uraian di atas menjelaskan bahwa seseorang dikatakan miskin secara absolute apabila tingkat pendapatanya berada dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan. Pada umumnya konsep kemiskinan selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Apabila tingkat pendapatan tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok, maka orang tersebut dikatakan miskin.

Menurut Winardi (dalam Rumiati 2000:100) mengatakan bahwa kemiskinan bahwa lazim di lukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.

Kemiskinan menurut BAPPENAS (2004). Mendefenisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang. Laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat. Hak hak dasar masyarakat desa antar lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih dan lingkungan hidup.

b. Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan kekurangan dari berbagai dimensi. Keadaan kekurangan tersebut dapat dipandang dari dimensi ekonomi, kesehatan, sosial, partisipasi, pemenuhan hak-hak dasar dan dimensi lainnya. Ukuran kemiskinan yang lebih banyak digunakan adalah ukuran pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Ukuran dimensi lainnya adalah indeks pembangunan manusia, indeks kemiskinan manusia, indeks kesetaraan gender dan lain-lainnya. Dengan ukuran indeks ini, potret kemiskinan secara makro dapat dikemukakan lebih lengkap.

Klasifikasi atau penggolongan orang atau masyarakat itu dikatakan miskin, ditetapkan dengan menggunakan tolok ukur. Tolok ukur yang umumnya dipakai adalah tingkat pendapatan dan kebutuhan relatif.

Selanjutnya menurut penelitian Harahap, Y (2006:19), suatu rumah tangga dapat dilihat tingkat kesejahteraannya dan penghidupan yang layak dari beberapa kondisi sosial ekonomi yaitu : perumahan , lama kawin, lama kepemilikan sumber daya ekonomi dan jumlah tanggungan keluarga. Kelima indikator tersebut dapat memberikan suatu kondisi apakah suatu rumah tangga digolongkan rumah tangga miskin atau tidak miskin. Perumahan dan pemukiman dalam kehidupan manusia memiliki fungsi dan peran penting serta arti dan makna yang dalam. Keadaan perumahan mencerminkan taraf hidup, kepribadian, dan peradaban penghuninya.

Kriteria masyarakat miskin lainnya adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut terdiri dari hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak lainnya.

Selanjutnya menurut Arsyad (2000:13), kemiskinan dapat dilihat dari beberapa pendekatan atau sudut pandang antara lain dari sisi ekonomi atau dari aspek pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan), yang ukurannya sangat relatif dan sangat ditentukan oleh penetapan garis kemiskinan oleh masing-masing negara.

Tabel. 4 : Kriteria Kemiskinan

Lembaga	Kriteria
Bank Dunia	Penghasilan < US \$ 1 = Rp. 9.000,- / hari
BPS sampai tahun 2004	❖ Sangat miskin : < 1900 kal/org/hari + Rp 120.000/bln ❖ Miskin : 1900 - 2100 kal/org /hari + Rp.120.000/bln ❖ Hampir Miskin : 2100 – 2300 kal/org /hari + Rp.175.000/bln
BKKBN	▪ Pra-Sejahtera : - Ekonomi : makan < 2 kali per hari; tidak ada pakaian ganti; sebagian besar berlantai tanah. - Non Ekonomi : tidak beribadah; berobat tidak ke sarana kesehatan. ▪ Pra-Sejahtera I: - Ekonomi : tidak makan daging > 1 minggu; luas lantai < 8 m² per jiwa - Non Ekonomi : sakit 3 bulan terakhir dan tidak ke sarana kesehatan

Sumber : Petunjuk Teknis Bantuan Kredit Mikro Nagari, TKPK Sumatera Barat.(2007)

Selanjutnya menurut Arsyad (2000:13), kemiskinan dapat dilihat dari beberapa pendekatan atau sudut pandang antara lain dari sisi ekonomi atau dari aspek pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan), yang ukurannya sangat relatif dan sangat ditentukan oleh penetapan garis kemiskinan oleh masing-masing negara.

Selain pendekatan aspek pengeluaran, menurut Esmara (1986:308) juga digunakan pendekatan derajat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan derajat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Derajat kedalaman kemiskinan digunakan untuk mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengangkat penduduk miskin.

Garis kemiskinan merupakan patokan terpenting untuk mengukur tingkat kemiskinan. Oleh karena itu kebijaksanaan untuk mengatasi kemiskinan akan terkait dengan tolak ukur garis kemiskinan. Pada dasarnya terdapat dua pendekatan dalam mengukur tingkat kemiskinan, menurut Widodo (dalam Syaid, 2007:17) diperoleh dari persamaan :

$$K = \frac{q}{n} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Dimana : K = tingkat kemiskinan.

q = jumlah penduduk miskin atau berada dibawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk.

c. Kemiskinan Struktural

Struktur merupakan keseluruhan yang bulat, yaitu bagian-bagian yang membentuknya tidak dapat berdiri sendiri di luar struktur itu. Berikut ini ada beberapa pendapat para ahli mengenai pendekatan struktural, yaitu suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sarannya tidak hanya ditujukan kepada salah satu unsur sebagai individu yang berdiri sendiri di luar kesatuannya, melainkan ditujukan pula kepada hubungan antar unsurnya (Fokemma, 1977:21).

Dari pendapat di atas menjelaskan Struktur merupakan keseluruhan yang bulat, yaitu bagian-bagian yang membentuknya tidak dapat berdiri sendiri di luar struktur itu .

Kemiskinan struktural adalah akibat kebijakan pemerintah dan perilaku korporasi yang membuat masyarakat miskin tidak atau sedikit sekali memiliki akses terhadap aset ekonomi produktif .

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, penggali pasir dan mereka yang tidak terpelajar dan tidak terlatih.

Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural ini adalah pemerintah karena pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin, jika pun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan. Sehingga tidak ada masyarakat miskin yang naik kelas, artinya jika pada awalnya buruh, nelayan, pemulung maka selamanya menjadi buruh nelayan dan pemulung, karena tidak ada upaya dalam menaikkan derajat dan kemampuan mereka baik itu dalam kesempatan pendidikan atau pelatihan.

Dari pendapat diatas Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.

d. Faktor Penyebab Kemiskinan Struktural

Muttaqin (2006 :1) mengemukakan bahwa kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, kolusi antara pengusaha dengan pejabat ,dan lain-lainya. Alfian dkk (1980) mengemukakan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh satu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi, bahkan kekurangan perlindungan hukum dari pemerintah .Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena faktor-faktor buatan manusia.

Kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya-raya. Mereka itu, walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa - apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya-raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya - raya itu masih menguasai berbagai kehidupan masyarakat, selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural.

6. Temuan Penelitian Sejenis

Hasil penelitian yang sejenis ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dibawah ini dikemukakan beberapa hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang menghasilkan beberapa kesimpulan:

- a. Oktavianus (2007:40) “Analisis Distribusi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa distribusi pendapatan nelayan di kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan indeks Gini diperoleh hasil 0,29 ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada sub sektor perikanan adalah sedang. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan adalah salah satu nagari yang merupakan bagian dari kecamatan sedangkan penelitian sejenis ini meneliti salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari propinsi.
- b. Yasril (2004:43) “Analisis Penghasilan Masyarakat Nelayan di Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan ketimpangan melalui indeks Gini pendapatan nelayan sebesar 0,31 ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan pada sub sektor perikanan adalah sedang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah lebih memfokuskan pada distribusi pendapatan nelayan yang meliputi distribusi pendapatan perorangan dan distribusi pendapatan fungsional nelayan.

- c. Dina Tias Sriyadi (2007:46) “Analisis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dan Distribusi Penguasaan Lahan di Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga tergolong rendah menurut analisis Gini dan kriteria bank dunia dengan hasil 40 % penduduk berpendapatan terendah menikmati 17,13 % dari total pendapatan masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini, penulis melihat distribusi pendapatan nelayan pada daerah penelitian yang berbeda dengan temuan sejenis ini.

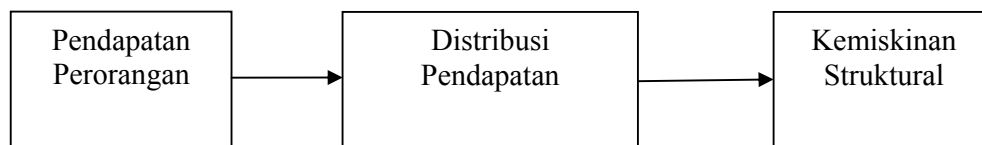
B. Kerangka Konseptual

Distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution of income*) merupakan ukuran yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Cara mendapatkan penghasilan tersebut tidak dipermasalahkan dan dalam hal ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, apakah itu berasal dari gajinya karena bekerja atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah ataupun warisan.

kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi bahkan kekurangan perlindungan hukum dan pemerintah.

Pendapatan perorangan nelayan di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir selatan menentukan distribusi pendapatan nelayan di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir selatan dari distribusi pendapatan tersebut terlihat kemiskinan struktural di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk lebih jelas dan mempermudah masalah penelitian ini maka di bawah ini dikemukakan kerangka berpikir dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian Studi Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan struktural pada Rumah Tangga Nelayan di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Hipotesis

Distribusi pendapatan nelayan di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Distribusi pendapatan perorangan nelayan nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan berada pada ketimpangan sedang.
2. Terdapat kemiskinan Struktural nelayan di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 88 orang responden nelayan di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi ketimpangan distribusi pendapatan perorangan nelayan di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil gini rasio sebesar 0,4841 yang berarti distribusi pendapatan perorangan nelayan berada pada kategori ketimpangan Sedang dengan rata-rata pendapatan perorangan nelayan sebesar Rp 45.585.447 per tahun.
2. Kemiskinan struktural yang terjadi di nagari Amping Parak kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan paling banyak disebabkan oleh indikator kebijakan ekonomi yang tidak adil yang menyebabkan seringkali nelayan menerima kebijakan ekonomi yang tidak adil dari pemerintah sehingga terjadilah kemiskinan struktural pada rumah tangga nelayan.

B. Saran

1. Bagi nelayan yang memiliki pendapatan di bawah Rp 4.800.000 per tahun diharapkan kepada dinas Kelautan dan Perikanan agar memberikan bantuan baik berupa kredit maupun alat tangkap ikan kepada nelayan yang benar-benar membutuhkan sehingga distribusi pendapatan perorangan nelayan lebih merata.

2. Bagi pemerintah daerah maupun pusat agar memberikan bantuan berupa modal kepada nelayan yang mempunyai pendapatan rendah sehingga mampu memanfaatkan bantuan tersebut dalam hal membuka usaha sampingan maupun peningkatan kualitas faktor-faktor produksi sehingga membantu pemerataan distribusi pendapatan nelayan secara keseluruhan.
3. Agar pemerintah daerah Pesisir Selatan maupun pusat mengorganisir dengan baik dalam memberikan bantuan berupa alat tangkap agar bantuan tersebut tepat sasaran dan sampai pada orang yang benar-benar membutuhkan.
4. Bagi nelayan yang memiliki alat tangkap diharapkan agar tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan nelayan yang tidak memiliki alat tangkap atau nelayan yang tidak memiliki modal. Nelayan pemilik alat tangkap mempercayai nelayan yang tidak memiliki alat tangkap.
5. Agar merubah sikap mental yang selama ini jelek atau tidak baik di mata nelayan pemilik modal atau nelayan pemilik alat tangkap, misalnya harus jujur, tidak menjual ikan di tengah laut atau melaporkan pada nelayan pemilik alat tangkap bahwa ikan tangkap di jual di tengah laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, A Kosim. 1980. *Ekonomi Pertanian*. Edisi Kedua. PT. Soron Pacenongan: Jakarta.
- Akhirmen.(2005). *Buku Ajar Statistika 1*. Padang.FE UNP
- Alfian, dkk. 1980. “*Pengertian Kemiskinan Struktural*”. Diakses Tanggal 10 September 2010. <http://www.google.com>
- Arikonto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi: Yogyakarta.
- Asmadia, Rory. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Perkapita Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta: Padang. (Tidak Dipublikasikan)
- Boediono. 1982. *Teori Pertumbuhan Penduduk*. LP3ES: Jakarta.
- BPS. 2008. *Gini Rasio Kota Padang*. Badan Pusat Statistik: Padang.
- , *Pesisir Selatan Dalam Angka*. Biro Pusat Statistik Pesisir Selatan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. 2008. *Data Statistik Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan: Painan*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan.Kecamatan Sutera. 2008. *Data Statistik Perikanan dan Kelautan Kecamatan Sutera : Sutera*.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga : Jakarta.
- Fokemma. 1977. *Teori Kemiskinan*. Diakses Tanggal 27 November 2010. <http://www.google.com>
- Hall dan Midgley 2004. *Kemiskinan Struktural*. Diakses Tanggal 27 November 2010. <http://www.google.com>
- Irwan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara : Jakarta.